

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI MALUKU**

**1. PETUGAS PERSIDANGAN**

Desk : 3  
 Provinsi : Maluku  
 Pimpinan Sidang 1 : Dir PD, Pak Agung M. H. Dorodjatoen - Koordinator Perkotaan  
 Pimpinan Sidang 2 : Dir PUMKMK, Ibu Mahatmi Parwitasari Saronto - Direktur PUMKMK  
 Notulis Aplikasi : Felicia Nugroho  
 Notulis Offline: Youone Vantomi Lumbanraja  
 Pembahas :

Pemerintah Daerah	Kementerian/Lembaga	Direktorat Sektor Bappenas
1. Bappeda Provinsi Maluku 2. Dinas Perhubungan Provinsi Maluku 3. Dinas Pertanian Provinsi Maluku 4. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku	1. Kementerian Pertanian 2. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 3. Kementerian Perhubungan 4. Kementerian Kesehatan 5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 6. Kementerian Kelautan dan Perikanan 7. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 8. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1. Direktorat Transportasi 2. Direktorat Pangan dan Pertanian 3. Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat 4. Direktorat Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif 5. Direktorat Perumahan dan Permukiman 6. Direktorat Lingkungan Hidup 7. Direktorat Kelautan dan Perikanan

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI MALUKU**

**2. KESEPAKATAN DAN CATATAN PERSIDANGAN**

No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
1	Pembangunan SPAM di Adaut Selaru	1	0	unit	Desa Adaut, Kecamatan Selaru	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	<b>Ditolak</b>		
		<b>Agenda Pembangunan</b>		<b>Sasaran Visi</b>		<b>Arah Pembangunan Nasional</b>			
		05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi		02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		16 - Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan			
		<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>KRO</b>		<b>RO</b>			
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penyelenggaraan Air Minum yang Layak	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman		Pembangunan SPAM Kabupaten/Kota			
		<b>Catatan dan Tanggapan</b>							
		<b>Pemerintah Daerah</b>		<b>Kementerian Lembaga</b>		<b>Direktorat Sektor Bappenas</b>			
		-		<b>PUPR</b> Usulan SPAM Adaut sudah dibahas dalam Forum Konsultansi Regional dan kesimpulannya ialah ditangguhkan/ belum diprioritaskan. Aset SPAM Adaut ini milik daerah, sehingga belum masuk prioritas. Terdapat beberapa isu dan RC yang perlu diklarifikasi					



**BAPPENAS**  
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI MALUKU**

			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sumber mata air baku yang berkurang sehingga butuh mata air lainnya</li> <li>2. Izin pemanfaatan air baku belum ada</li> <li>3. Kesiapan lembaga pengelola (PDAM berstatus sakit)</li> </ol> <p><b>Pemda</b> Isu-isu di atas benar. Apakah ada opsi Pamsimas untuk dapat mengakomodir Kepulauan Tanimbar?</p> <p><b>Perkim</b> Kami setuju dengan catatan PUPR, belum dapat diakomodir. Untuk usulan Pamsimas, masih dalam pembahasan terkait Lokpri karena ada keterbatasan pada Pagu.</p> <p><b>Pemda</b> Harapannya penentuan lokpri dapat berkoordinasi dengan Daerah.</p>				
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan
		Usulan	Kesepakatan				
2	Pembangunan TPA Toisapu	1	0	unit	Kota Ambon	Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Ditolak
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional	

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI MALUKU**

		05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	05 - Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju Net Zero Emission	15 - Lingkungan Hidup Berkualitas			
		<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>KRO</b>	<b>RO</b>		
		Program Kualitas Lingkungan Hidup	Pengelolaan Sampah	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Fasilitas Penanganan Sampah Terbangun		
		<b>Catatan dan Tanggapan</b>					
		<b>Pemerintah Daerah</b>	<b>Kementerian Lembaga</b>	<b>Direktorat Sektor Bappenas</b>			
		<b>Pemda</b> TPA Toisapu sudah beroperasi namun butuh penambahan lahan di Kota Ambon karena TPA yang sekarang hanya dapat menampung kapasitas sampah hingga 2-3 tahun ke depan.  Pada tahun 2024, sedang dalam proses akuisisi lahan. Kita mengusulkan untuk perluasan TPA.	<b>PUPR</b> RC belum ada, lahan belum siap. Atas arahan Bappenas, untuk tahun 2024 dan seterusnya, kami sudah tidak bisa membangun TPA, kami hanya bisa membangun TPST.  Kalau sampah RT, seharusnya taggingnya ke PUPR, namun kalau B3 ke KLHK (Salah tagging).	-			
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan
		Usulan	Kesepakatan				
3	Kebun Bibit Rumput Laut/Kultur Jaringan	40	0	paket	• Kab. Kepulauan Tanimbar Kab. Maluku Barat Daya	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	<b>Ditolak</b>
		<b>Agenda Pembangunan</b>		<b>Sasaran Visi</b>		<b>Arah Pembangunan Nasional</b>	

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI MALUKU**

	02 - Transformasi Ekonomi	01 - Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju	04 - Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi	
	<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>KRO</b>	<b>RO</b>
	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Pengelolaan Perbenihan Ikan	Bantuan Tanaman	Bibit Rumput Laut kultur jaringan yang disalurkan ke masyarakat
	<b>Catatan dan Tanggapan</b>			
	<b>Pemerintah Daerah</b>	<b>Kementerian Lembaga</b>	<b>Direktorat Sektor Bappenas</b>	
	<p><b>Pemda</b> Arahan dari KKP untuk pengembangan perikanan budidaya (rumput laut). Lokpri di Kep. Aru, Kep. Tanimbar (2 kecamatan), MBD (P. Luang). RC yang sudah tersedia berupa dukungan dari UPTD (penyedia benih), UPTD pusat, secara tata ruang sudah diakomodir dan ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan tahun ini. Kegiatan modelling budidaya rumput laut (pembenihan, kultur jaringan, dan pengembangan). Setiap titik dibutuhkan sekitar 2 Ha.</p>	<p><b>KKP</b> Kebun Bibit Rumput Laut disulkan untuk di Maluku Tenggara dan kepulauan Aru.</p> <p><b>Pemda</b> Untuk menu DAK, tidak ada menu Provinsi, adanya di Kab/Kota. Sedangkan dari menu DAK tidak dibuka juga untuk Kab/Kota.</p> <p>Kewenangan kebun bibit laut di Provinsi, namun untuk di darat oleh Kab/Kota.</p> <p><b>DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA - KKP</b> Merupakan bantuan rutin melalui APBN, Maluku sebagai lokpri. Bantuan melalui UPT Ambon untuk penyediaan bibit berkualitas kultur jaringan di Kab. Maluku Tenggara. Lokasi spesifik dan</p>	<p><b>TRPPB - BAPPENAS</b> Perlu perbaikan geotagging karena masih diinput 1 titik.</p>	

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI MALUKU**

				jumlah paket akan diidentifikasi lebih lanjut jika sudah ada penetapan lokasi berdasarkan ketersediaan anggaran.					
				<b>PIMSID</b> Direkomendasikan dengan catatan.					
				<b>Kesimpulan</b> Ditolak dan diarahkan ke DAK dengan catatan perlu perbaikan menu					
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
4	Sarana Transportasi Budidaya Rumput Laut (Longboat)	40	0	paket	Kab. Kepulauan Tanimbar Kab. Maluku Barat Daya	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	Ditolak		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		02 - Transformasi Ekonomi		01 - Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju		04 - Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi			
		Program	Kegiatan	KRO		RO			
		Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan		Kluster Komoditas Unggulan berbasis kawasan			
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI MALUKU**

		<b>Kesimpulan</b> Ditolak dengan catatan dialihkan ke DAK. Perbaiki/dibuka menu DAK budidaya rumput laut untuk provinsi, sementara di DAK baru ada di kabupaten/kota.	-	-					
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
5	Keramba Jaring Apung HDPE	25	0	Unit	- Kab. Maluku Tengah - Kab. Seram Bagian Barat Kota Ambon	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	Ditolak		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		02 - Transformasi Ekonomi		01 - Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju		04 - Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi			
		Program	Kegiatan	KRO		RO			
		Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Pengelolaan Perbenihan Ikan	Bantuan Peralatan / Sarana		Sarana perbenihan ikan yang disalurkan ke masyarakat			
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			
		-		<b>KKP</b> Ditolak untuk masuk DAK dengan catatan menu harus dibuka di provinsi.  <b>Pemda</b>		-			

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI MALUKU**

				<p>Keramba jaring apung Ikan Kerapu.</p> <p><b>KKP</b> Tidak ada kegiatan/ Renja RO keramba jaring di KKP di RPJM. KJA masih dalam pertimbangan tidak ada nomenklatur nya, diarahkan ke DAK</p>					
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
6	Benih Ikan Kerapu	75000	75000	Ekor	- Kab. Maluku Tengah - Kab. Seram Bagian Barat Kota Ambon	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	Diakomodir		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		02 - Transformasi Ekonomi		01 - Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju		04 - Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi			
		Program	Kegiatan	KRO		RO			
		Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Pengelolaan Perbenihan Ikan	Bantuan Hewan		Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke masyarakat			
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah	Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas				

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI MALUKU**

			Diakomdir dengan catatan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran		-				
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
7	Pengembangan Pelabuhan Perikanan Tulehu	1	0	Unit	Kab. Maluku Tengah	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	<b>Ditolak</b>		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		02 - Transformasi Ekonomi		01 - Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju		04 - Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi			
		Program	Kegiatan	KRO		RO			
		Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan		Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan PP Perintis yang ditingkatkan fasillitasnya untuk Mendukung Penangkapan Ikan Terukur			
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			
		<b>Dinas Perikanan</b> Ini merupakan usulan dari Kementerian sejak tahun 2020. Sudah dikomunikasikan dengan Dinas, yang belum keluar ialah Lokpri Perikanan Tangkap.		- Biroren KKP		-			



**BAPPENAS**  
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

## NOTULENSI

### PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

#### PROVINSI MALUKU

	<p>Ini merupakan usulan dari DJPT. Dokumen penyerahan lahan ke pemerintah Pemprov sudah siap tinggal persiapan ke lapangan. Pelabuhan perikanan sudah beraktivitas namun pada tahun 2021 terdampak rusak berat karena gempa dan menjadi kewenangan provinsi untuk dibangun untuk tahun 2025.</p> <p><b>KKP:</b> Bisa diakomodir, namun menyelesaikan persyaratan yang ada, terutama status kepemilikan aset.</p> <p>Diarahkan untuk masuk ke DAK. Lokpri sekarang sedang masuk ke pembahasan. Dokumen untuk DAK 2025 harus segera diinput pada Juni 2024.</p> <p><b>Pemda</b> Apabila akan dimasukkan ke DAK, harus ada kepastian Lokpri.</p> <p>Sebelum gempa besar 2021, Pelabuhan sudah ada dan beroperasi. Namun setelah gempa, seluruh dermaga dan fasilitasnya rata dengan tanah. Pada tahun 2021, ada aspirasi DPR RI Komisi IV sehingga rencana pembangunan dilanjutkan. Pada tahun 2023, ada UU yang</p>			
--	---	--	--	--



**BAPPENAS**  
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

## NOTULENSI

### PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

#### PROVINSI MALUKU

		<p>menyerahkan kewenangan Pelabuhan ke Daerah, bukan di Pusat lagi.</p> <p>Sudah ada hibah tanah Kemenhub ke Pemprov Maluku. Pembangunan dimulai dari awal lagi.</p> <p><b>Kesimpulan</b> Ditolak dengan catatan diusulkan masuk DAK. Pemda perlu menyiapkan kelengkapan DAK untuk menjadi Lokpri sebelum Input Pagu Indikatif DAK Krisna.</p>					
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan
		Usulan	Kesepakatan				
8	Rehabilitasi dan Peremajaan Komoditas Perkebunan	1500	0	Ha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kab. Maluku Tenggara</li> <li>- Kab. Maluku Tengah</li> <li>- Kab. Buru</li> <li>- Kab. Seram Bagian Barat</li> <li>- Kab. Seram Bagian Timur</li> </ul>	Kementerian Pertanian	<b>Ditolak</b>
		<b>Agenda Pembangunan</b>		<b>Sasaran Visi</b>		<b>Arah Pembangunan Nasional</b>	
		02 - Transformasi Ekonomi		01 - Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju		04 - Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi	
		<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>KRO</b>		<b>RO</b>	

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI MALUKU**

		Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Nursery		
<b>Catatan dan Tanggapan</b>							
		<b>Pemerintah Daerah</b>	<b>Kementerian Lembaga</b>		<b>Direktorat Sektor Bappenas</b>		
			<p><b>Kementan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diarahkan ke DAK</li> <li>- Untuk aktivitas berupa nursery tanaman perkebunan</li> <li>- Menyusul "nursery tanaman perkebunan"</li> <li>- Syaratnya kesesuaian lokpri</li> </ul> <p><b>Pimsid</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ditolak dan dialihkan ke DAK</li> <li>- Nanti akan diexercise kembali lokpri nya</li> <li>- Mohon dapat disampaikan ke Bappenas, kira-kira kab/kota mana yang perlu diajukan menjadi lokpri dan menu apa yang perlu dikeluarkan</li> </ul>		-		
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan
		Usulan	Kesepakatan				
9	Rehabilitasi dan Peremajaan Komoditas Kelapa	500	0	Ha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kab. Kepulauan Tanimbar</li> <li>- Kab. Maluku Tenggara</li> <li>- Kab. Maluku Tengah</li> <li>- Kab. Buru</li> </ul>	Kementerian Pertanian	<b>Ditolak</b>

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI MALUKU**

					- Kab. Seram Bagian Barat - Kab. Seram Bagian Timur Kota Tual		
		<b>Agenda Pembangunan</b>	<b>Sasaran Visi</b>		<b>Arah Pembangunan Nasional</b>		
		02 - Transformasi Ekonomi	01 - Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju		04 - Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi		
		<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>KRO</b>		<b>RO</b>	
		Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup		Nursery	
		<b>Catatan dan Tanggapan</b>					
		<b>Pemerintah Daerah</b>	<b>Kementerian Lembaga</b>			<b>Direktorat Sektor Bappenas</b>	
		-	<b>Kementan</b> - Diarahkan ke DAK - Untuk aktivitas berupa nursery tanaman perkebunan - Menyusul "nursery tanaman perkebunan" - Syaratnya kesesuaian lokpri  <b>Pimsid</b> - Ditolak dan dialihkan ke DAK - Nanti akan diexercise kembali lokpri nya - Mohon dapat disampaikan ke Bappenas, kira-kira kab/kota mana yang perlu diajukan menjadi			-	

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI MALUKU**

				lokpri dan menu apa yang perlu dikeluarkan					
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
10	Rehabilitasi dan Peremajaan Komoditas Cengkeh	3000	0	Ha	- Kab. Maluku Tengah - Kab. Buru - Kab. Seram Bagian Barat - Kab. Seram Bagian Timur Kab. Buru Selatan	Kementerian Pertanian	Ditolak		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		02 - Transformasi Ekonomi		01 - Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju		04 - Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi			
		Program	Kegiatan	KRO		RO			
		Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup		Nursery			
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI MALUKU**

		-	<p><b>Kementan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diarahkan ke DAK</li> <li>- Untuk aktivitas berupa nursery tanaman perkebunan</li> <li>- Menyanya "nursery tanaman perkebunan"</li> <li>- Syaratnya kesesuaian lokpri</li> </ul> <p><b>Pimsid</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ditolak dan dialihkan ke DAK</li> <li>- Nanti akan diexercise kembali lokpri nya</li> <li>- Mohon dapat disampaikan ke Bappenas, kira-kira kab/kota mana yang perlu diajukan menjadi lokpri dan menu apa yang perlu dikeluarkan</li> </ul>			-		
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan	
		Usulan	Kesepakatan					
11	12 - Masterplan Kawasan Pariwisata Banda	1	0	dokumen	Kab. Maluku Tengah	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	<b>Ditolak</b>	
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional		
		02 Transformasi Ekonomi		01 Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju		04 - Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi		
		Program	Kegiatan	KRO		RO		
		Program Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif	Pengembangan Tata Kelola Destinasi Pariwisata	Koordinasi		Koordinasi Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas		
		Catatan dan Tanggapan						



**BAPPENAS**  
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

## NOTULENSI

### PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

#### PROVINSI MALUKU

No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan
		Usulan	Kesepakatan				
		<b>Pemerintah Daerah</b> <b>Pemda</b> - Sudah ada RO khusus untuk perencanaan DTW dan akan dilakukan diskusi khusus 2025 - Ada menu DAK untuk penyusunan masterplan - Tampaknya pengusulan akan dialihkan ke DAK		<b>Kementerian Lembaga</b> -		<b>Direktorat Sektor Bappenas</b> <b>Dit. IPEK</b> Masterplan Pariwisata Banda belum masuk ke Prioritas 2025. Akan ada RO pendampingan untuk penyusunan masterplan, namun lokasinya belum ada di Bandaneira <b>Regional 3</b> Saat ini (2024), Regional 3 sedang merancang Masterplan Regional Banda Naira 2024. <b>Pimsid</b> - Masterplan Regional Banda Naira 2024 dan akan menjadi prasyarat dalam pengusulan Masterplan Khusus Pariwisata - Penajaman program dengan roadmap, sudah ada RO khusus. Parekraf untuk penyusunan masterplan DAK non fisik	
12	13 - Pelayanan Telemedicine berbasis gugus pulau	11	0	Kab/Kota	Kab. Kepulauan Tanimbar Kab. Maluku Tenggara Kab. Maluku Tengah Kab. Buru Kab. Kepulauan Aru	Kementerian Kesehatan	<b>Ditolak</b>

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI MALUKU**

					Kab. Seram Bagian Barat Kab. Seram Bagian Timur Kab. Maluku Barat Daya Kab. Buru Selatan Kota Ambon Kota Tual		
		<b>Agenda Pembangunan</b>		<b>Sasaran Visi</b>		<b>Arah Pembangunan Nasional</b>	
		01 Transformasi Sosial		04 Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkatkan		01 Kesehatan untuk Semua	
		<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>KRO</b>		<b>RO</b>	
		Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	Penguatan Pelayanan Kesehatan di Provinsi	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah		Pengembangan Telemedicine (Dekonsentrasi) (LR)	
		<b>Catatan dan Tanggapan</b>					
		<b>Pemerintah Daerah</b>		<b>Kementerian Lembaga</b>		<b>Direktorat Sektor Bappenas</b>	
				-		Dit. Kesehatan dan Gizi Masyarakat Ditolak dan diusulkan untuk masuk ke menu DAK	
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan
		Usulan	Kesepakatan				
13	14 Pengembanga	11		Kab/Kota	Kab. Kepulauan Tanimbar	Kementerian Kesehatan	<b>Ditolak</b>

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI MALUKU**

n Pelayanan Kesehatan Berbasis Gugus Pulau					Kab. Maluku Tenggara Kab. Maluku Tengah Kab. Buru Kab. Kepulauan Aru Kab. Seram Bagian Barat Kab. Seram Bagian Timur Kab. Maluku Barat Daya Kab. Buru Selatan Kota Ambon Kota Tual		
	<b>Agenda Pembangunan</b>		<b>Sasaran Visi</b>		<b>Arah Pembangunan Nasional</b>		
	01 Transformasi Sosial		04 Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat		01 Kesehatan untuk Semua		
	<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>		<b>KRO</b>		<b>RO</b>	
	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	Pembinaan Mutu Pelayanan Kesehatan		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		NSPK Mutu dan Akreditasi Puskesmas (LP)	
	<b>Catatan dan Tanggapan</b>						
	<b>Pemerintah Daerah</b>		<b>Kementerian Lembaga</b>		<b>Direktorat Sektor Bappenas</b>		

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI MALUKU**

		-	-	<b>Dit. Kesehatan dan Gizi Masyarakat</b> Ditolak dan diusulkan untuk masuk ke menu DAK (Kesehatan Bergerak)					
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
14	15 - Penyediaan Angkutan Penyeberangan Perintis 1000-1500 GT	1	0	Unit	Provinsi Maluku	Kementerian Perhubungan	<b>Ditolak</b>		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		02 Transformasi Ekonomi		02 Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		08 Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi			
		Program	Kegiatan	KRO		RO			
		Program Infrastruktur Konektivitas	Pelayanan Transportasi Laut	Sarana Bidang Konektivitas Laut		Kapal Laut Prioritas Nasional			
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			
		<b>Kabid Infrastruktur Dishub Maluku</b> Kapal Ferry untuk lintasan Ambon - NTT. Sudah ada dari tahun 2017, namun sekarang sudah rusak, kami mengusulkan untuk mengganti. Dibutuhkan untuk Kab. Maluku Barat Daya.  <b>Dishub Maluku</b>		<b>Kemenhub</b> Izin konfirmasi. Apakah ini pelabuhan penyeberangan atau laut?  <b>Dishub Maluku</b> Beberapa pelabuhan penyeberangan dan beberapa lainnya ialah pelabuhan laut.  <b>Kemenhub</b>		<b>Ditransport</b> Akan kami catat. Bagi daerah kepulauan, daerah kepulauan memiliki urgensi tinggi. Selain demand, negara juga butuh hadir dalam memberikan pelayanan daerah kepulauan. Akan dibahas lebih lanjut pada TM. Diakomodir dengan catatan melihat lintasan rute prioritas dan ketersediaan anggaran.			



**BAPPENAS**  
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

## NOTULENSI

### PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

#### PROVINSI MALUKU

		<p>Transmaluku mencoba menghubungkan seluruh pulau di Maluku: Ambon, Buru, Seram, Gorom, Tual, Aru, Tanimbar. Semua sudah terhubung. Namun, Tanimbar sampai ke MDB terputus, karena Kapal Marsela sudah rusak dari 2017, sehingga dibutuhkan oleh masyarakat MDB karena sulit untuk melakukan pembangunan. Kapal ini diharapkan dapat menghubungkan transportasi penyebrangan.</p>	<p>Apakah ada kajian studi terkait <i>demand</i>?</p> <p><b>Dishub Maluku</b> Kapal ini berperan sebagai pengganti Kapal Marsela yang telah memiliki <i>demand</i> sejak dahulu.</p> <p><b>Kemenhub</b> Ini mengaktifkan lintasan. Mungkin bisa dikoordinasikan dengan BPTD apabila ada lintasan yang load factor yang belum optimal bisa dimasukkan ke lintasan ini.</p> <p><b>Dishub</b> Kami akan koordinasikan dengan Kepala BPTD</p> <p><b>Bappeda Maluku</b> Pembicaraan terkait ini sudah berulang-ulang kali. Maluku sebagai provinsi kepulauan memiliki urgensi tinggi untuk mendapat</p> <p>-</p>	<p><b>Pimsid 1</b> Apakah ada kriteria prioritas?</p> <p><b>Kemenhub</b> Saat ini ada moretarium kapal. Untuk pengadaan kapal harus ada kajian demand dan pengelola kapal. Apabila nanti dilakukan pengadaan kapal, siapa yang akan melakukan pengelolaan operasional? Kalau Pemda bisa mengusulkan melalui DAK, kalau ASDP harus ada subsidi.</p> <p><b>Dishub</b> DAK tidak bisa mengakomodasi 1000GT. Apabila ASDP, subsidi nantinya bisa diberikan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Yang lebih penting adalah memberikan penyediaan kapal sehingga dapat dilakukan pembangunan di pulau-pulau di Maluku.</p> <p><b>Bappeda Maluku</b> Sekarang Ambon-MBD hanya dilayani 1x seminggu dan itu mahal. Kami berharap untuk mendapatkan kapal dari daerah lain yang memiliki LF rendah.</p> <p><b>Pimsid:</b> Apabila tidak dilakukan pengadaan, maka usulan ini akan ditolak dengan catatan (karena</p>	
--	--	--	---	--	--

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI MALUKU**

						<p>masih moretarium dan menunggu kebijakan)</p> <p><b>Ditransport</b> Kami sepakat ditolak dengan catatan. Kami akan meng-up pada Bappenas. Mungkin ada efektifitas keperintisan yang dapat diarahkan. Hal ini bisa di-up ke Rakortis. Ditolak dan digeser ke layanan perintisan. Rakortis akan diadakan pada bulan Agustus-November 2024.</p> <p>Untuk kapal penyebrangan antar pulau akan dikelola oleh ASDP (penugasan), untuk kapal penyebrangan laut dikelola oleh Pelni.</p> <p><b>Pimsid:</b> Kesimpulan: Ditolak dengan catatan karena ada moretarioum kapal, namun dapat disampaikan pada Rakortis.</p>	
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan
		Usulan	Kesepakatan				
15	16 Pembangunan Fasilitasi Pengelolaan -	1	0	Paket	Kab. Maluku Tengah	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	<b>Ditolak</b>
		<b>Agenda Pembangunan</b>		<b>Sasaran Visi</b>		<b>Arah Pembangunan Nasional</b>	

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI MALUKU**

Limbah B3 (Insinerator)	05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	05 - Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju Net Zero Emission	16 - Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	
	Program	Kegiatan	KRO	RO
	Program Kualitas Lingkungan Hidup	Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Non Bahan Berbahaya dan Beracun	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Fasilitas pengolahan limbah Non B3 menjadi Biogas
	Catatan dan Tanggapan			
	Pemerintah Daerah	Kementerian Lembaga	Direktorat Sektor Bappenas	
		<p><b>DirLH</b> Lokus provinsi Maluku menjadi <i>shortlist</i> pembangunan fasilitas limbah media yang dibiayain oleh KLHK. Namun, sampai tahun 2024, masih ada syarat yang belum terpenuhi: lahan dan AMDAL.</p> <p>Pada tahun 2025, Pemda diarahkan untuk memepersiapkan dokumen pada tahun 2025 sehingga dapat diusulkan kembali pada tahun 2026.</p> <p><b>KLHK</b> Masih terkendala di lahan. Sekarang, Provinsi Maluku bukan lagi menjadi lokasi prioritas, karena dari Pemda tidak menyelesaikan dokumen-dokumen pada tahun-tahun sebelumnya.</p>	-	

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI MALUKU**

			<p><b>Pemda</b> Lokasi incinerator awalnya di Kota Maluku Tengah namun didemo, dan sekarang dipindahkan ke Keb Maluku Tengah dan sudah disosialisasi kepada masyarakat daerah. Untuk lokasi dan lahan sudah bisa digunakan. Apabila lahan tersebut bisa dibayarkan pada tahun ini, pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan. Pembayaran diharapkan pada bulan Oktober 2024.</p>						
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
16	17 - Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Luhu	1	0	Unit	Kab. Seram Bagian Barat	Kementerian Perhubungan	Ditolak		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		02 Transformasi Ekonomi		02 Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		08 Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi			
		Program	Kegiatan	KRO		RO			
		Program Infrastruktur Konektivitas	Pelayanan Transportasi Laut	Pelayanan Publik Lainnya		Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN)			
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah	Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas				

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI MALUKU**

		<p><b>Dishub Maluku</b></p> <p>Kelengkapan syarat sudah ada. Kajian dan DED sudah ada, dan sudah ada rekomendasi gubernur, bupati, sertifikat tanah.</p>	<p><b>Kemenhub</b></p> <p>Apakah sudah ada Rencana Induk Pelabuhan (Masterplan). Apakah kelengkapannya sudah dibicarakan dengan ASDP? Apakah ada DLKP dan DLKL?</p> <p><b>Dishub Maluku</b></p> <p>Sudah ada. Sudah didiskusikan dengan ASDP. Sudah ada.</p> <p><b>Kemenhub</b></p> <p>Terdapat beberapa dokumen perencanaan yang belum dipenuhi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen Induk Pelabuhan</li> <li>- DLKP dan DLKL</li> <li>- Dokumen Lingkungan</li> <li>- Dokumen Amdalalin</li> <li>- Dokumen Pemanfaatan Pasca Konstruksi</li> <li>- Penlok</li> </ul> <p>Pelabuhan Luhu tidak masuk dalam Renstra 2020-2024, sehingga belum masuk menjadi prioritas Kemenhub. Saat ini, diusulkan untuk penyelesaian kelengkapan dokumen</p> <p>Perlu dipastikan juga untuk jalan aksesnya.</p> <p><b>Dishub Maluku</b></p>	<p style="text-align: center;">-</p>	
--	--	--	---	--------------------------------------	--



**BAPPENAS**  
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

## NOTULENSI

### PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

#### PROVINSI MALUKU

				<p>Sudah ada jalan aksesnya sudah ada namun beraspal dan dekat dengan Kantor Perikanan. Kurang dari 100 meter sudah kena jalan aspal.</p> <p><b>Distrans</b> Diusulkan untuk tahun 2025 menjadi masa penyiapan dokumen DED dan dilakukan usulan kembali tahun 2026, sehingga dapat dianggarkan oleh Bappenas dalam penyiapan dan pengesahan dokumen (Penlok dan RIP yang disahkan oleh Menteri).</p> <p>Karena terlalu cepat bagi Pemda untuk menyelesaikan Penlok dan RIP hingga Agustus 2024 karena ada kemungkinan penyesuaian kembali dan membutuhkan waktu yang lebih lama.</p> <p><b>Kesimpulan:</b> Ditolak dengan catatan tahun 2024-2025 hanya perencanaan saja.</p>			
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan
		Usulan	Kesepakatan				
17	18 - Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga	1	1	KWP	Kab. Kepulauan Aru	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Diakomodir
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional	



**BAPPENAS**  
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI MALUKU**

	Surya (PLTS) Terpusat	02 Transformasi Ekonomi	02 Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan	08 Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi			
		<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>KRO</b>	<b>RO</b>		
		Program Energi dan Ketenagalistrikan	Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam	Penurunan Intensitas Energi Final		
		<b>Catatan dan Tanggapan</b>					
		<b>Pemerintah Daerah</b>	<b>Kementerian Lembaga</b>	<b>Direktorat Sektor Bappenas</b>			
		-		Dir EDMP PLTS terpusat di Kabupaten Kepulauan Aru. Diakomodir.			
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan
		Usulan	Kesepakatan				
18	19 - Pembangunan Bandar Udara Gorom	1	1	Unit	Kab. Seram Bagian Timur	Kementerian Perhubungan	<b>Diakomodir</b>
		<b>Agenda Pembangunan</b>		<b>Sasaran Visi</b>		<b>Arah Pembangunan Nasional</b>	
		<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>KRO</b>	<b>RO</b>		
		Program Infrastruktur Konektivitas	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	Program Infrastruktur Konektivitas	Bandar Udara Baru		
		<b>Catatan dan Tanggapan</b>					

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI MALUKU**

		Pemerintah Daerah	Kementerian Lembaga	Direktorat Sektor Bappenas	
			<p><b>Kemenuh</b> Usulan dapat diakomodir apabila lahan sudah tersedia, adanya Masterplan Bandara, dan pagu anggaran ditambahkan (belum mencukupi)</p> <p><b>Dishub</b> Sudah ada Penlok dan Izin</p> <p><b>Kemenuh</b> RTT masih dalam proses penyelesaian</p> <p><b>Dishub</b> Kami sudah mengukur lahan 60ha yang disebutkan. Jalan lingkaran Gorom sudah ada. Bandara ini merupakan 1 dari 10 bandara yang belum terbangun dari RPJMN 2020-2024. Pada Penetapan Penlok pada tahun 2021 poin 3d agak sedikit membingungkan karena membebani Pemda dalam membangun Bandara (yang merupakan kewajiban Pusat) selama 5 tahun.</p> <p><b>Pimsid</b> Apakah bisa diakomodir? Dengan catatan Pemda melengkapi syarat-syarat (mis: RTT, land clearing)</p> <p><b>Perencanaan Kemenuh</b></p>	-	

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI MALUKU**

			<p>Proses pembebasan lahan kebutuhan 61,67 hektar. Perlu kepastian jalan akses dan prasarana penunjang yang perlu disediakan Pemda. Sampai tahun ini masih moretarium pembangunan Bandara.</p> <p><b>Pimsid:</b> Diakomodasi dengan catatan menyelesaikan kebutuhan lahan, jalan dan akses sudah disiapkan, RTT difinalisasi.</p> <p><b>Dit. Perencanaan</b> Usulan pembangunan belum diakomodir karena pagu anggaran yang belum mencukupi dan kelengkapan dokumen belum selesai.</p>				
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan
		Usulan	Kesepakatan				
19	Penyediaan Pelayanan Kesehatan Bergerak di DTPK	11	0	Kab/Kota	Kab. Kepulauan Tanimbar Kab. Maluku Tenggara Kab. Maluku Tengah Kab. Buru Kab. Kepulauan Aru Kab. Seram Bagian Barat Kab. Seram	Kementerian Kesehatan	<b>Ditolak</b>

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI MALUKU**

					Bagian Timur Kab. Maluku Barat Daya Kab. Buru Selatan Kota Ambon Kota Tual	
		<b>Agenda Pembangunan</b>	<b>Sasaran Visi</b>		<b>Arah Pembangunan Nasional</b>	
		01 - Transformasi Sosial	04 - Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkatkan		01 - Kesehatan untuk Semua	
		<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>KRO</b>		<b>RO</b>
		<b>Catatan dan Tanggapan</b>				
		<b>Pemerintah Daerah</b>	<b>Kementerian Lembaga</b>		<b>Direktorat Sektor Bappenas</b>	
		<p><b>Pemda</b> Tahun 2020, telemedicine sudah dijalankan di beberapa rumah sakit (Malra). Saat tahun 2020, dilaksanakan melalui DAK atau APBN murni? Terkait DAK, usulan kami sulit untuk menjadi lokpri yang ditetapkan oleh KL dalam DAK.</p> <p style="text-align: center;">-</p>			<p><b>DirKGM</b> - Maluku menjadi salah satu lokpri pelayanan kesehatan bergerak - Perlu menyiapkan dokumen</p> <p><b>Pimsid 2</b> - Ini menjadi catatan penetapan lokpri - Memastikan ke Dit PD dan Dit Reg III untuk memastikan agar provinsi bisa mengisi menu (menu terbuka) dan menjadi lokpri - Sebaiknya memastikan pembahasan menu-menu DAK sudah mempertimbangkan masukan-masukan provinsi</p>	

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI MALUKU**

**3. REKAPITULASI**

<b>HASIL KESEPAKATAN</b>	<b>TOTAL USULAN BERDASARKAN HASIL KESEPAKATAN</b>
Diakomdir	<b>3</b>
Ditolak	<b>16</b>
Tidak Terbahas	<b>0</b>